PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh

Alifia Silvi Fatih¹, Soeharjoto², Wahyuningsih Santosa³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: ¹alifiafatih25@gmail.com, ²soeharjoto@trisakti.ac.id,

³wahyuningsih@trisakti.ac.id

Article History:

Received: 09-12-2021

Revised: 17-01-2022

Accepted: 23-01-2022

Keywords:

Demokrasi, Pemilihan

Umum, Kesejahteraan

Abstract: Negara di dunia ini, banyak yang menerapkan sistem demokrasi. Pada sistemnya, memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam mensejahterakan masyarakat, yang menggunakan prinsip kebersamaan, dalam bentuk dari rakyat. oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum sudah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan negara dalam melaksanakan pesta demokrasi. Namun, tidak semua pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai demokrasi, sehingga agar diakui, perlu memenuhi beberapa kriteria. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud pelaksanaan demokrasi yang dilakukan Indonesia. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu sarana pemerintah guna melaksanakan demokrasi. Hal ini, dapat terealisasi karena dalam pelaksanaannya, telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi. Keberhasilan ini, perlu berkesinambungan, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [3]. Dalam pemerintahannya, menggunakan politik dengan sistem demokrasi Pancasila [2]. Pada sistem ini, berbeda dengan sistem lainnya, karena melibatkan unsur adat istiadat masyarakat [1]. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan demokrasi sebagai mekanisme dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara [8].

Demokrasi berasal dari kata *democratia* dalam bahasa Yunani Kuno, yang artinya *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan [17]. Negara sebagai wadah demokrasi, memiliki tugas untuk menciptakan hukum dan penguasa yang terpilih secara sah oleh rakyatnya harus mentaatinya [15]. Artinya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat [12]. Untuk itu, Friedrich Julius Stal mengindikasikan bahwa negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, bila melakukan

pemisahan kekuasaan, yang dikenal dengan istilah trias politica, yakni kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang mengadili atas pelanggaran undang-undang [4]. Pembagian kekuasaan ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berkuasa [9].

Suatu negara, walaupun melaksanakan pemilihan umum, namun tidak semuanya dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Untuk itu, negara dapat memperoleh pengakuan demokrasi bila melakukan political order, dalam bentuk melaksanakan akuntabilitas penguasa, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu yang jujur, serta menghormati hak dasar manusia [10]. Kesemuanya ini, sesuai dengan prinsip utama demokrasi dari Robert A. Dahl berupa [17]:

1. Kompetisi demokrasi, dengan memberikan peluang pada semua masyarakat supaya dapat bersaing dalam menduduki posisi kekuasaan di kursi pemerintahan.
2. Partisipasi, dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas dan teratur, serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3. Kebebasan berpendapat, pers, mendirikan, dan menjadi anggota organisasi yang dijamin, serta menjadikannya sebagai saluran partisipasi dan kompetisi.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dalam pelaksanaan pemerintahannya mengklaim telah melaksanakan demokrasi secara baik. Namun, untuk mempertegas fenomena yang ada, perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian bagaimana wujud dari pelaksanaan demokrasi yang dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini, penting dilakukan agar dapat diperoleh salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Dipilihnya sistem ini, karena Pancasila telah sesuai dengan nilai sosial dan budaya bangsa, serta adat istiadat setempat. Demokrasi Pancasila, mempunyai ciri khas yang unik, dibandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain. Keunikan sistemnya, berupa adanya jaminan bagi masyarakat dalam kebebasan beragama. Dipilihnya demokrasi oleh bangsa Indonesia karena sistemnya memiliki banyak keunggulan. Adapun keunggulannya berupa [14]:

1. Mencegah tumbuhnya pemerintahan yang otoriter.
2. Menjamin hak asasi warga.
3. Menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga.
4. Membantu melindungi kepentingan pokok masyarakat.
5. Memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi warganya untuk menentukan nasibnya sendiri.
6. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Membantu perkembangan manusia secara optimal.
8. Membantu perkembangan politik lebih optimal.
9. Terbentuknya kolaborasi yang baik dari semua pihak.
10. Kemakmuran masyarakatnya lebih tinggi.

Negara yang menerapkan sistem demokrasi, lebih mengutamakan kepentingan rakyat

dari pada yang lainnya [11]. Hal ini, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yang tercantum pada tujuan Negara Republik Indonesia, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun tujuannya, Indonesia merupakan negara yang berorientasi pada usaha guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diupayakan dengan melakukan satu aktivitas, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya, yakni dengan cara melaksanakan pemilihan umum [20].

Dalam prosesnya, demokrasi di Indonesia telah dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait. Adapun faktor yang dapat mempengaruhinya berupa budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik [21]. Kesemuanya ini, mengakibatkan demokratisasi berlangsung relatif lebih dinamis. Sejak Pemilu 1999, dinamikanya semakin pesat dan semarak, terutama pasca Pemilu presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada 2005. Pelaksanaan demokrasi di daerah, merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pilkada secara langsung merupakan terobosan besar dalam upaya pendalaman demokrasi, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan masyarakat setempat.

Proses demokrasi di tingkat nasional sebenarnya tidak mudah, terutama pada saat meningkatkan kualitas pemilihan Presiden (Pilpres) dan konsolidasi demokrasi. Dalam proses ini, mengalami krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam Pilpres, akan berpengaruh terhadap kualitas dari tata kelola pemerintahan. Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian lebih, karena secara umum demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, sehingga secara khusus Pilpres yang berkualitas, akan membuat pemerintahan semakin efektif. Jadi, sistem politik yang demokratis, seharusnya dapat menjamin kesejahteraan rakyat, Adapun cara pemerintah yang berkuasa membuat kebijakan publik yang pro rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pada metode ini, bersifat deskriptif analisis, sehingga dapat digunakan untuk membangun teori dari beberapa pemahaman. Namun, dalam prosesnya perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga akan memperoleh informasi yang akurat dan reliable. Metode ini, memiliki beberapa kelebihan terutama untuk melihat gejala sosial. Kesemuanya, karena dilakukan pengamatan pada tahap proses hingga dibuatkannya simpulan. Penelitian ini, berupa studi kasus yang terbentuk dari suatu sistem yang terintegrasi dan mengikat, serta berfokus pada permasalahan. Penerapan studi kasus bertujuan agar dapat mendeskripsikan analisisnya secara lebih intensif dan mendalam [6]. Hal ini, akan memperoleh hasil yang lebih konsistensi dan sekuensi yang tinggi [7]. Untuk itu, dalam membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti, digunakan data sekunder yang bersumber dari arsip, dokumen pribadi dan resmi, jurnal, buku, dan media elektronik. Kemudian, memilah dan memverifikasi informasi yang diperoleh serta dilakukan analisa dengan menggunakan Focus Group Discussion, sehingga dapat diperoleh simpulan yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pilpres di Indonesia, pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi, terutama yang terkait dengan jaminan atas kebebasan individu dan persamaan

di bidang politik. Pilpres langsung, dikategorikan sebagai proses demokrasi formal dan merupakan tindak lanjut dari jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Untuk itu, Pilpres bukan sekedar pesta demokrasi semata, tetapi sudah merupakan bagian dari instrumen dalam proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Dengan demikian, Pilpres merupakan upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang lebih efektif pasca dilakukannya Pemilu.

Dalam prakteknya, pendalaman demokrasi dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat. Pendalaman demokrasi negara, bermakna adanya pengembangan mekanisme dari kelembagaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan semua pihak dan menguatkan kapasitas administratif. Pendalaman demokrasi masyarakat, merujuk pada kelembagaan, yakni dengan cara meningkatkan peran dari aktivitas politik formal masyarakat pada tingkat lokal. Hal ini, membuat Pilpres langsung menjadi langkah awal dalam menguatkan peran masyarakat. Peran ini, harus dilakukan secara berkesinambungan, hingga ada pergantian pemerintahan. Dengan metode ini, peran masyarakat selalu mewarnai implementasi dari program pemerintah, sehingga akan berdampak pada semakin meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi legitimate karena diperkuat dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa:

1. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas, dengan partisipasi dari rakyat dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemilihan umum dalam memilih anggota lembaga perwakilan, harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.

Penerapan aktivitas Pemilu di Indonesia sudah berlangsung lama dan merupakan wujud pesta demokrasi nasional. Pada 1955, di era Demokrasi Parlementer, Indonesia baru pertama kali menyelenggarakan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1-nya, menyatakan bahwa anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warganegara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin terlebih dahulu. Hal ini, mengungkapkan bahwa warganegara Indonesia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan negara. Kondisi ini, membuat Pemilu dapat berjalan secara demokratis, aman, dan damai. Pemilu kedua, dilaksanakan pada 1971, pada saat era pemerintahan Orde Baru. Dalam era ini, pelaksanaan Pemilu diadakan pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemerintah Orde baru dalam pelaksanaan Pemilu, menggunakan perangkat Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tentang Referendum, dan Undang-Undang tentang Keormasan. Penggunaan Undang-Undang tersebut, disusun guna mengendalikan hak politik rakyat. Dengan demikian, keberhasilan dari Pemilu ini merupakan akibat dari efektifnya pemberlakuan dari Undang-

Undang tersebut [18]. Pada 1999 di era Reformasi, Pemilu dilaksanakan Kembali dan diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1999, secara tidak langsung penyelenggaraan Pemilunya telah menggeser dominasi dan peran pemerintah sebagai aparatur negara kepada bentuk partisipasi rakyat dalam bentuk partai politik. Pemilu 2004, diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota. Dalam pelaksanaan Pemilunya, semakin membuka peluang yang besar bagi masyarakat, untuk turut merayakan pesta demokrasi rakyat. Hal ini, akibat kebijakan dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, tidak semua masyarakat dapat mendaftar diri menjadi anggota KPU, terutama pada individu yang menjadi pengurus partai politik, sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan atau jabatan fungsional. Dalam perkembangannya, pelaksanaan Pemilu semakin baik, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Pemilu yang terselenggara secara legitimate, merupakan hasil dari tata kelola, sistem, serta kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Tata kelola Pemilu, merupakan kombinasi dari dua konsep utama, yakni tata kelola dan pemilihan umum [16]. Untuk itu, dalam tata kelola Pemilu perlu melaksanakan aktivitas yang saling terkait, membuat aturan dan sekaligus melaksanakan ajudikasi aturannya [19]. Dengan demikian, tata kelola Pemilu sebenarnya tidak hanya bersifat administratif saja, tapi juga bersifat politis. Dalam pelaksanaan tata Kelola Pemilu, terdapat beberapa tahapan yang membentuk suatu siklus, berupa penetapan kerangka legal, perencanaan dan implementasi, training dan pendidikan, pendaftaran pemilih, kampanye Pemilu, pemungutan suara, verifikasi hasil, pasca Pemilu berupa update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset [5].

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara, dapat dikatakan berhasil bila dapat merepresentasikan sistem demokrasi, keberlangsungan pemilihan, calon, dan badan yang dapat mengatur serta memiliki rasa tanggung jawab dan patuh pada semua aturan yang ada. Untuk itu, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, diselenggarakan oleh organisasi dan pemilih yang peserta sama, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, Pemilu yang telah terselenggara harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, Pemilu dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada keenam asas tersebut, sehingga atmosfer demokrasinya menjadi semakin kuat. Selain itu, masih ada empat alasan lainnya yang mendukung agar Pemilu pelaksanaannya perlu melakukan komitmen terhadap enam asas tersebut, yakni agar dapat memastikan bahwa Pemilu yang terselenggara memiliki legitimasi, mengantisipasi terjadinya konflik internal maupun eksternal, membentuk karakter pemimpin yang berkualitas, dan mendapat pengakuan dari dunia internasional kepada Indonesia. Adanya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, akan menghasilkan terwujudnya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik.

Sistem pemerintahan yang baik, sering diartikan sebagai Good Governance. Masyarakat sering menganggap bahwa Good Governance merupakan kinerja dari suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang telah memenuhi prasyarat tertentu. World Bank menyatakan bahwa Good Governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, alokasi dana investasi secara tepat, dan

pengecahan korupsi baik secara politik maupun administratif, disiplin, dan menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha [13]. Pada dasarnya, prinsip Good Governance berkaitan dengan Pemilu. Untuk itu, Pemilu yang baik perlu dipartisipasikan oleh seluruh masyarakat dan transparans.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah berlangsung lama dan mengalami proses menuju pada kepentingan bersama, guna meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini, dibuktikan dengan aktivitasnya dilakukan sesuai dengan peraturan, transparan, dan semakin maraknya dalam pelaksanaan Pemilu, hingga dibuatkannya panggung debat calon Presiden dan wakil Presiden. Adapun tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui terealisasinya program kerja dan strategi yang akan dilaksanakan untuk kemajuan negara. Kesemuanya ini, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah merupakan salah satu indicator dari terwujudnya pelaksanaan demokrasi.

KESIMPULAN

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan pada berbagai dekade. Aktivitas ini, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam upaya untuk menerapkan sila keempat dari Pancasila. Kondisi ini, berdampak pada semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki pemerintah, sehingga sangat bermanfaat guna mempertahankan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Kesemuanya, terjadi karena dalam Pemilu yang dilakukan terus mengalami perubahan yang semakin signifikan dengan kriteria demokrasi. Hal ini, dapat menjadikan pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi. Keberhasilan ini, sangat penting bagi bangsa Indonesia, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penelitian selanjutnya sebaiknya juga memperhatikan dari sisi pelaku demokrasi terutama para calon dan partai yang bersaing dalam memenangkan Pemilu guna menaingkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Amanulloh, N. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- [2] Agustam. Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. *Jurnal TAPIS* 7, no. 12 (2011): 79-91.
- [3] Bo'a, F. Y. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27-49.
- [4] Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- [5] Catt, Helena, Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wofl, P. *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA. 2014.
- [6] Creswell, J. W. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press. 2002.
- [7] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. *Handbook of Qualitatif Research (Terj)*, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- [8] Fahmi, K. Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 121-160.
- [9] Gusmansyah, W. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *AL-IMARAH* 2, no. 2

- (2017): 123-134.
- [10] Gaffar, A. *Politik Indoensia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- [11] Marzuki, H. M. L. Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009): 19-23.
- [12] Novianti, C. E. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013). 333-354.
- [13] Nanda, V. P. Good governance concept revisited. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 603 (2006): 269–283.
- [14] Robert, A. D. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- [15] Suhartini. Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal de Jure* 11, no. 1 (2019):62-78.
- [16] Sukmajati, M., & Perdana, A. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2019.
- [17] Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press. 2015.
- [18] Samego, I. *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan. 1998.
- [19] Mozzafar, & Schdler. The Comparative study of Electoral Governance Introduction. *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002), 5-27.
- [20] Ulum, M. B., & Farizi, D. A. Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009): 83-101.
- [21] Zuhro, R. S. Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69-81.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN